

## Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tania Febrianti<sup>1</sup>, Indrawati Yuhertiana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Jl.Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, telp: (031) 870 6369 / fax: (031) 870 6372,

e-mail: febriantitania47@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Jl.Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, telp: (031) 8706369 / fax: (031) 870 6372,

e-mail: yuhertiana@upnjatim.ac.id

### ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 April 2021

Received in revised form 2 Mei 2021

Accepted 10 Juni 2021

Available online Juli 2021

### ABSTRACT

This study aimed to examine and analyze the effect of implementation of performance-based budgeting, budget target accuracy and compliance with laws and regulations to performance accountability of government agencies. This research uses quantitative research using primary data. The primary data is a questionnaire that has been distributed to 97 respondents in Regional Device of Surabaya City Government. The data analysis technique used in this research is PLS-SEM with the help of SmartPLS version 3.0 for windows software. The results of the study prove that the variables of implementation of performance-based budgeting, budget target accuracy and compliance with laws and regulations had positive effect on performance accountability of government agencies. In other words, its Regional Device located in Surabaya City Government had good governance with good accountability as the realization of well budget and internal supervision.

**Keywords:** Performance, Budgets, Regulations, Accountability, Government.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja, ketepatan sasaran anggaran, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Data primer tersebut yaitu kuesioner yang telah disebar kepada 97 responden di Perangkat Daerah Kota Surabaya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah PLS-SEM dengan bantuan perangkat lunak *SmartPLS versi 3.0 for windows*. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel penerapan anggaran berbasis kinerja, ketepatan sasaran anggaran, dan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil ini menunjukkan bahwa Perangkat Daerah Kota Surabaya memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dengan pertanggungjawaban atas realisasi anggaran dan pengawasan yang dinilai baik.

**Kata Kunci:** Kinerja, Anggaran, Peraturan, Akuntabilitas, Pemerintah.

*Received April 30, 2021; Revised Mei 2, 2021; Accepted Juni 22, 2021*

## 1. PENDAHULUAN

Organisasi pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Sehingga, sangat umum terjadi apabila terdapat permintaan tentang keterbukaan informasi publik dan tuntutan informasi pertanggung jawaban kinerja badan publik secara lengkap dan transparan terutama atas segala aktivitasnya yang menyangkut pendanaan yang berasal dari masyarakat [2]. Dan sebagai organisasi sektor publik, hal tersebut haruslah sesuai dengan syarat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998.

Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian PANRB mengembangkan SAKIP, yang merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik [14]. Hasil evaluasi SAKIP secara nasional telah menunjukkan instansi pemerintah di Indonesia semakin baik dalam memastikan pelaksanaan anggarannya untuk mencapai sasaran sesuai perencanaan pembangunan. Hal itu terbukti dengan instansi pemerintah yang dapat melakukan refocusing program kegiatan sehingga berdampak dalam pencapaian sasaran pembangunan [14].

Tetapi hasil peningkatan tersebut, tidak dapat mengimbangi dan tidak cukup untuk memuaskan harapan masyarakat. Pada kenyataannya program yang melibatkan anggaran seringkali tetap menjadi bumerang bagi akuntabilitas kinerja karena apabila mendapati pengelolaan keuangan yang buruk ditambah sasaran anggarannya yang tidak tepat, justru efek buruknya bisa mengakibatkan rendahnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Seperti halnya fenomena yang sedang menjerat Pemerintahan Kota Surabaya yakni hasil jaring aspirasi (reses) anggota DPRD Surabaya yang mendapati keluhan masyarakat tentang kurang perhatian dan tidak meratanya Pemkot Surabaya terhadap sarana dan prasarana wilayah pinggiran. Pembangunan di tengah kota banyak dimanfaatkan untuk ambisi pencitraan semata, sebab faktanya wilayah-wilayah pinggiran terbengkalai, sehingga masyarakat menyoroti kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) yang dinilainya tidak mampu melakukan perencanaan pembangunan secara merata [24]. Selain itu banyak pengaduan terhadap kinerja pemerintah di wilayah Surabaya yang terjaring oleh Komisi Pelayanan Publik (KPP), hal ini membuktikan bahwa pelayanan publik di Kota Metropolitan Surabaya masih menyisakan catatan buruk bagi warganya [12].

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam memaksimalkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja yang konon dapat mengatasi kekurangan tafsiran kinerja dalam menggapai target [28]. Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja, pemerintah berharap anggaran digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik sehingga mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian Anggraeni [1] menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Surya [25] menunjukkan hasil bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh negatif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Tantangan selanjutnya, pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang berakuntabilitas tidak lepas dari ketepatan sasaran anggaran yang merupakan sejauh mana tujuan anggaran pemerintah daerah ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut [4]. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Dalam penelitian Fauzan et al. [5], dan penelitian Azizah [2] menunjukkan hasil penelitian bahwa ketepatan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan ketepatan sasaran anggaran dalam penelitian Herawaty [11] dan Pangumbalerang & Pinatik [16] menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selain itu, Pemerintah dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan administrasi pemerintahan yang berhubungan dengan anggaran [21]. Dengan adanya Ketaatan pada peraturan, laporan akuntabilitas yang dihasilkan harus tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik [20]. Penelitian yang dilakukan oleh Hafiz et al. [9] dan penelitian Setyawan et al. [22] membuktikan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja, tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Lumenta et al. [15] menunjukkan hasil yang berbanding terbalik, karena ketaatan peraturan perundangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang tersebut dan adanya *research gap* dari penelitian terdahulu, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah, yaitu: 1) Apakah penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Perangkat Daerah Kota Surabaya? 2) Apakah ketepatan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Perangkat Daerah Kota Surabaya? 3) Apakah ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Perangkat Daerah Kota Surabaya?. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja, ketepatan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Perangkat Daerah Kota Surabaya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. *Stewardship Theory*

Teori *Stewardship* yang dinyatakan oleh Donaldson & Davis pada tahun 1991 merupakan suatu keadaan dimana manajer sebagai *Steward* lebih berfokus pada kepentingan bersama atau tujuan organisasi bukan pada keinginan pribadi. Teori ini didasarkan untuk membentuk mekanisme penanggungjawaban dari organisasi agar selalu dapat bekerja sesuai tugas dan tanggungjawabnya sebaik mungkin, secara tepat dan efisien untuk kepentingan publik dan instansi mereka. Teori ini menggambarkan dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi [6].

### 2.2. *Goal Setting Theory*

Teori penetapan tujuan pertama kali dinyatakan oleh Edwin A. Locke pada tahun 1968. Teori ini menekankan pada pentingnya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang dihasilkan. Konsep dasarnya yaitu seseorang yang mampu memahami tujuan yang diharapkan oleh organisasi, maka pemahaman tersebut akan mempengaruhi perilaku kerjanya [19]. *Goal Setting Theory* mengisyaratkan bahwa seorang individu berkomitmen pada tujuan. Jika seorang individu memiliki komitmen untuk mencapai tujuannya, maka komitmen tersebut akan mempengaruhi tindakannya dan mempengaruhi konsekuensi kerjanya.

### 2.3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik [18]. Akuntabilitas kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja, yang merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), proses (*proces*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

### 2.4. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran Berbasis Kinerja merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi [3]. Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dimana dalam sistem penganggaran sangat memperhitungkan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhitungkan efisiensi dalam mencapai kinerja [10].

### 2.5. Ketepatan Sasaran Anggaran

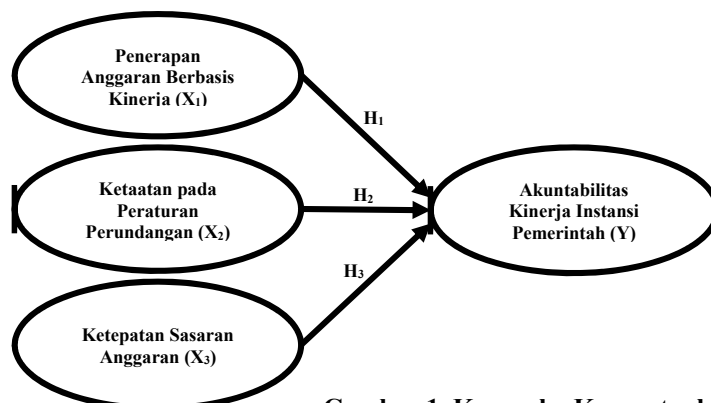
Ketepatan sasaran anggaran dalam pemerintah daerah merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mengetahui kinerja anggaran yang terjadi di lapangan apakah tepat sasaran dan sesuai target kegiatan dengan pembangunan masyarakat [17]. Ketepatan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran [4].

### 2.6. Ketaatan pada Peraturan Perundangan

Pertanggungjawaban keuangan negara oleh pemerintah merupakan bagian dari akuntabilitas publik yang harus disampaikan oleh pemerintah atas penggunaan keuangan negara yang diperoleh dari rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara [9].

## 2.7. Kerangka Konseptual dan Hipotesis

Berikut ini merupakan hubungan variabel yang disusun dalam kerangka konseptual:



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut maka dapat dihasilkan hipotesis :

H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

H<sub>2</sub> : Terdapat pengaruh ketepatan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

H<sub>3</sub> : Terdapat pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menganalisis data primer berupa kuesioner yang telah disebar secara langsung. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* dengan bantuan *software SmartPLS 3.0 for windows*. PLS bertujuan untuk menguji hubungan prediktif antar konstruk dengan melihat apakah ada hubungan atau pengaruh antar konstruk tersebut [8]. Objek penelitian ini yaitu penerapan anggaran berbasis kinerja (X<sub>1</sub>), ketepatan sasaran anggaran (X<sub>2</sub>), ketaatan pada peraturan perundangan (X<sub>3</sub>), dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

Populasi dalam penelitian ini yaitu 489 pegawai Perangkat Daerah khususnya pada Badan Daerah dan Dinas Daerah Kota Surabaya yang terlibat dengan pengelolaan keuangan pada setiap sub bagian. Dalam menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling*, dengan menggunakan rumus slovin [13] :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan : n = Ukuran sample / jumlah responden

N = Ukuran Populasi

e = Presentase kelonggaran sampel yang masih bisa ditolerir/margin of error ; e = 0,1

Maka :

$$n = \frac{489}{1 + 489(0,1)^2} = \frac{489}{1 + 489(0,01)} = \frac{489}{1 + 4,89} = \frac{489}{5,89} = 83,02$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka minimal jumlah sampel yang dapat digunakan pada penelitian ini adalah 84 responden. Sehingga untuk memenuhi minimal jumlah sampel, kuesioner yang disebar kepada responden adalah sebanyak 104 kuesioner dengan rincian masing-masing dari 26 SKPD akan memperoleh 4 kuesioner.

Skala yang digunakan dalam pembuatan kuesioner penelitian ini ialah skala likert untuk mengukur sikap seseorang dengan menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap subjek, objek, atau kejadian tertentu dengan lima alternatif jawaban yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) cukup

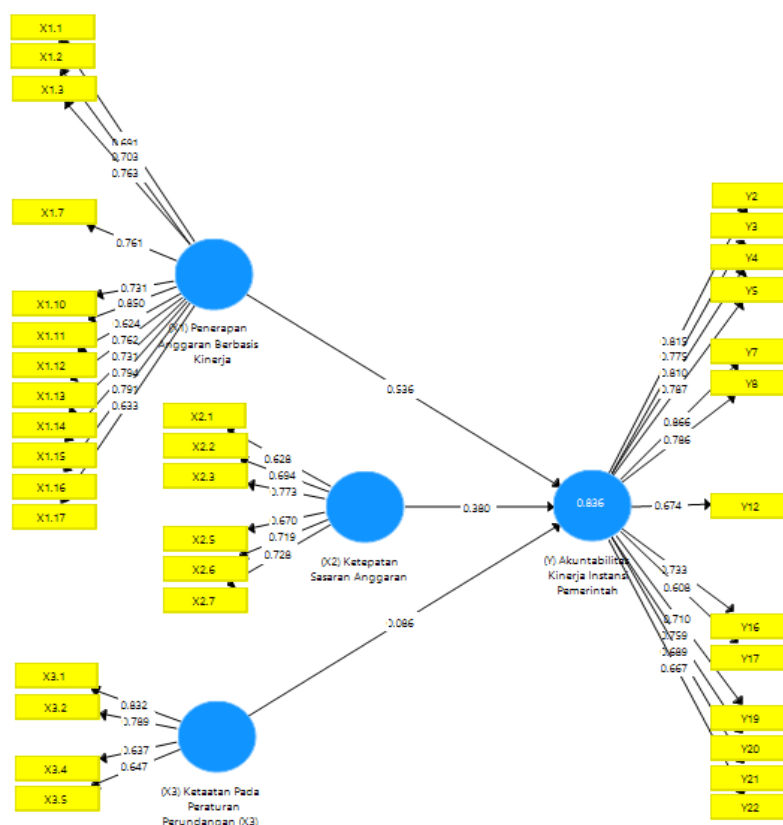
setuju, (4) setuju, dan (5) sangat setuju [23]. Data yang telah terkumpul diuji kualitas datanya terlebih dahulu menggunakan uji validitas dan reliabilitas yang kemudian dilakukan uji hipotesis dengan cara melihat *path coefficient* untuk meninjau dampak beberapa variabel independen terhadap variabel dependen.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada Perangkat Daerah khususnya 4 Badan Daerah dan 22 Dinas Daerah Kota Surabaya. Dalam penelitian ini diketahui bahwa variabel independen adalah penerapan anggaran berbasis kinerja ( $X_1$ ), ketepatan sasaran anggaran ( $X_2$ ), ketaatan pada peraturan perundangan ( $X_3$ ), dan variabel dependen adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Peneliti menyebarkan kuesioner pada 26 SKPD sebanyak 104 kuesioner dengan masing-masing diberi 4 kuesioner. Namun, kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini hanya 97 kuesioner. Adapun hasil dari pengujian yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

##### 4.1 Pengujian *Convergent Validity*

*Convergent validity* dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item *score/component score* yang diestimasi dengan Software SmartPLS 3.0. Penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran dianggap sudah memadai apabila menggunakan batas nilai loading sebesar 0,5 sampai 0,6 [7]. Dan dalam penelitian ini menggunakan batas *loading factor* sebesar 0,6 dengan penyesuaian melalui 3 tahap pembuangan indikator yang memiliki nilai *loading factor* belum melebihi batas angka 0,60 sampai menyisakan indikator yang mempunyai validitas konvergen yang baik. Adapun hasil dari pengujian Outer Loading Tahap 3 sebagai berikut :



**Gambar 2. Outer Loading Tahap 3**

Berdasarkan tabel 3 dapat didapatkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SmartPLS mengenai hubungan antar variabel yang sudah valid atau memenuhi nilai *convergent validity*, setelah melalui 3 tahap penyesuaian pembuangan indikator yang memiliki nilai *loading factor* belum melebihi batas angka 0,60. Sehingga menyisakan 12 indikator pada variabel  $X_1$ , 6 indikator pada variabel  $X_2$ , 4 indikator pada variabel  $X_3$ , dan 13 indikator pada variabel Y.

#### 4.2 Pengujian *Discriminant Validity*

Dalam penelitian ini, model telah mempunyai *discriminant validity* yang baik karena setiap nilai loading dari setiap indikator dari sebuah variabel laten memiliki nilai loading yang paling besar dari nilai loading lain terhadap variabel laten lainnya. Selain itu untuk menilai *discriminant validity* juga dengan membandingkan nilai *square root of average variance extracted* (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Dinyatakan valid apabila nilai AVE lebih besar dari 0,5 [7]. Adapun seperti tabel dibawah ini :

**Tabel 1. Average Variance Extracted (AVE)**

Variabel	AVE
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja	0,546
Ketepatan Sasaran Anggaran	0,544
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	0,535
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,559

**Sumber :** Data diolah peneliti, 2021

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa semua variabel telah memiliki nilai AVE diatas 0,50 sebagaimana kriteria yang direkomendasikan, sehingga variabel yang ada telah valid atau memenuhi nilai *Discriminant Validity*.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai *Cronbach's Alpha* pada tabel diatas, didapatkan nilai *Standardized Cronbach's Alpha* yang menunjukkan angka lebih besar dari 0,7. Artinya media pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kuesioner dianggap sudah cukup *reliable*, karena menunjukkan tingkat konsistensi dan keakuratan yang baik.

#### 4.3 Uji Reliabilitas

Dalam uji reliabilitas ini, menggunakan metode *Cronbach's Alpha* yang digunakan untuk mengukur hubungan atau korelasi antara jawaban responden yang satu dengan yang lain dalam setiap pertanyaan. Suatu penelitian dianggap *reliable* jika memiliki *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,7. Adapun seperti tabel dibawah ini :

**Tabel 2. Cronchbach's Alpha**

Variabel	Cronchbach Alpha
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja	0,923
Ketepatan Sasaran Anggaran	0,792
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	0,756
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,933

**Sumber :** Data diolah peneliti, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan nilai *Cronbach's Alpha* pada tabel diatas, didapatkan nilai *Standardized Cronbach's Alpha* yang menunjukkan angka lebih besar dari 0,7. Artinya media pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kuesioner dianggap sudah cukup *reliable*, karena menunjukkan tingkat konsistensi dan keakuratan yang baik.

#### 4.4 Pengujian Inner Model

Pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antar konstruk, nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen. Adapun seperti tabel dibawah ini :

**Tabel 3. Structural Model Specification**

	R Square
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,834

**Sumber :** Data diolah peneliti, 2021

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *R-square* sebesar 0,834 memiliki arti bahwa penelitian ini memiliki hasil yang sangat baik persamaan strukturalnya, dan selain itu, persentase pengaruh variabel Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja ( $X_1$ ), Ketepatan Sasaran Anggaran ( $X_2$ ), Ketaatan pada Peraturan Perundangan ( $X_3$ ) sangat tinggi yakni sebesar 83,4% sedangkan sisanya yakni sebesar 16,6% dijelaskan oleh variabel lain yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( $Y$ ) diluar dari penelitian ini.

#### 4.5 Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini melihat *path coefficients* yang menunjukkan koefisien parameter dan nilai signifikansi-*statistic*. Signifikansi parameter yang diestimasi dapat memberikan informasi mengenai hubungan antar variabel-variabel penelitian. Batas untuk menerima hipotesis yang diajukan yaitu apabila nilai T-Statistic lebih dari 1,96 ( $>1,96$ ) dengan nilai P-Values kurang dari 0,05 ( $P < 0,05$ ). Dan batas untuk menolak hipotesis yang diajukan yaitu apabila nilai T-Statistic kurang dari 1,96 ( $<1,96$ ) dengan nilai P-Values lebih dari 0,05 ( $P > 0,05$ ). Hasil hipotesis tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4. Uji Hipotesis berdasarkan Path Coefficient**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja → Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,572	0,573	0,090	6,389	0,000
Ketepatan Sasaran Anggaran → Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,349	0,354	0,076	4,623	0,000
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan → Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,318	0,328	0,091	3,966	0,004

Sumber : Data diolah peneliti, 2021

Berdasarkan nilai *inner weight* sebagaimana ditunjukkan Tabel 4 diatas, maka dapat diketahui bahwa uji hipotesis pertama menyatakan penerapan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, uji hipotesis kedua menyatakan ketepatan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, karena semua variabel yang diuji menghasilkan nilai T-Statistic  $>1,96$  dengan nilai P-Values  $<0,05$ .

#### 4.6 Pembahasan

##### 4.6.1 Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Diterimanya Hipotesis 1, memberikan makna bahwa dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja menjadi suatu cara dalam mewujudkan pencapaian kinerja dimana dalam sistem penganggaran sangat memperhitungkan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhitungkan efisiensi dalam mencapai kinerja. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori *stewardship* bahwa mekanisme penanggungjawaban dari organisasi yaitu dengan bekerja sesuai tugas dan tanggungjawabnya sebaik mungkin, secara tepat dan efisien untuk kepentingan publik dan instansi.

Jadi dalam hal ini diketahui bahwa Perangkat Daerah Kota Surabaya apabila menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan lebih maksimal, maka penyaluran anggaran bisa terlaksana dengan lebih efektif dan efisien, serta menghadirkan pelaporan yang akuntabel, jelas dan lebih mengutamakan kepada tujuan dengan strategi yang terukur dalam menggunakan anggaran. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Wahdatul et al. [27], Verasvera [26], dan Anggraeni [1] bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dilihat dari koefisien parameter *original sample* sebesar 0,572 dan nilai *t-statistic* sebesar 6,389 lebih dari 1,96 dan *P Values* sebesar 0,000 kurang dari 0,05.

##### 4.6.2 Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Diterimanya Hipotesis 2, memberikan makna bahwa dengan adanya ketepatan sasaran anggaran yang jelas dan spesifik akan mempermudah tanggungjawab pelaksanaan tugas organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pernyataan tersebut sesuai dengan goal setting theory yakni menekankan pada pentingnya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang dihasilkan.

Jadi dalam hal ini diketahui bahwa Perangkat Daerah Kota Surabaya memprioritaskan tingkat kepentingan sasaran anggaran untuk merealisasikan setiap program kegiatan sesuai dengan Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah disusun secara akuntabel. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Fauzan et al. [5], penelitian Hafiz et al. [9] dan penelitian Azizah [2] bahwa ketepatan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dilihat dari koefisien parameter original sample sebesar 0,349 dan nilai t-statistic sebesar 4,623 lebih dari 1,96 dan P Values sebesar 0,000 kurang dari 0,05.

#### **4.6.3 Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Diterimanya Hipotesis 3, memberikan makna bahwa dengan adanya ketaatan pada peraturan, laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dengan amanah konstitusi. Dan mempertanggungjawabkan kewajiban pemerintah atas penggunaan keuangan Negara yang diperoleh dari keuangan rakyat dan untuk rakyat. Pernyataan tersebut sesuai dengan goal setting theory yang mengisyaratkan bahwa seorang individu berkomitmen pada tujuan, yakni pemerintah yang memiliki komitmen dan mempengaruhi konsekuensi kinerjanya untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Jadi dalam hal ini diketahui bahwa Perangkat Daerah Kota Surabaya selalu menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang ada, sebagai stabilitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Hafiz et al. [9] dan Setyawan et al. [22] bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja, dilihat dari koefisien parameter original sample sebesar 0,318 dan nilai t-statistic sebesar 3,966 lebih dari 1,96 dan P Values sebesar 0,004 kurang dari 0,05.

### **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebagaimana telah disajikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya.
2. Ketepatan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya.
3. Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Sebaiknya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terlibat turut membantu proses penelitian dengan serius guna meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, selain itu pegawai keuangan SKPD terkait diharapkan dapat berpartisipasi lebih baik lagi dalam mengisi kuesioner penelitian.
2. Diharapkan peneliti selanjutnya menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas penyebaran kuesioner sehingga hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih luas.



## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggraeni, F. (2020). "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*. 1(1), 36–44.
- [2] Azizah, A. (2020). "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1(1), 1–14.
- [3] Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. In Jakarta: Erlangga. 171
- [4] Fathia, N., Yusraini, P., & Anggraini, L. (2017). "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja Dan Pengendalian Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Kasus SKPD di Prov. Riau)." *JOM Fekon*, 4(1), 670.
- [5] Fauzan, R. H., Nasir, A., & Silalahi, S. P. (2017). "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat)." *JOM Fekon*, 4(1), 1–13.
- [6] Fauziah, S. (2016). "Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance, Motivasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintahan: Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta." *Jurnal UMS*.
- [7] Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS) (Keempat)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 39-40
- [8] Ghozali, Imam, & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. (Kedua). Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- [9] Hafiz, M., Rasuli, M., & Kurnia, P. (2017). "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Dan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Kampar)." *JOM Fekon*, 4(1), 528–542.
- [10] Hartanto, M. R., Busaini, & Animah. (2018). "Implementation of Performance-Based Budgeting: A Phenomenological Study on National Land Agency." *International Journal of Scientific Research and Management*.
- [11] Herawaty, N. (2014). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi." *Jurnal Cakrawala Akuntansi*, 1(2), 151–161.
- [12] Ilham, M. (2020). *Layanan Publik di Surabaya, Bobrok! SurabayaPagi.Com*.  
<https://surabayapagi.com/read/layanan-publik-di-surabaya-bobrok>
- [13] Judge Noor. (2016). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Prenada Media.
- [14] Kemenpan RB. (2019). *Laporan Kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019*. 110. (39-43)
- [15] Lumenta, A. L., Morasa, J., & Mawikere, L. (2016). "Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kabupaten Minahasa Selatan)." *Jurnal EMBA*, 4(3), 135–146.
- [16] Pangumbalerang, A., & Pinatik, S. (2014). "Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah." *Jurnal EMBA*, 2(2), 800–808.
- [17] Paramitha, I. A. M. D., & Gayatri. (2016). "Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja." *E-Jurnal Akuntansi*, 16(3), 2457–2479.
- [18] Purnamasari, R. (2019). *Determinan Goal-Setting terhadap Kinerja Pegawai Pengelola Keuangan. RELEVANCE : Journal of Management and Business*. <https://doi.org/10.22515/relevance.v2i1.1662>
- [19] Pracelina, D. D., & Wuryani, E. (2019). "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jombang." *Jurnal Akuntansi AKUNESA*.
- [20] Razi, R. F., Savitri, E., & Azhar, A. (2017). "Pengaruh Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah)." *JOM Fekon*, 4(1), 294–308.

- 
- [21] Rere, Y. D., & Retnani, E. D. (2018). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(1), 16.
- [22] Setyawan, H., Rusli, A., & Hariyani, E. (2017). "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating." *JOM Fekon*, 4(1).
- [23] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. In Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- [24] Supriyatno, H. (2020). Wilayah Pinggiran Kota Surabaya Banyak Tak Tersentuh Pembangunan. *Harian Bhirawa Online*.  
<https://www.harianbhirawa.co.id/wilayah-pinggiran-kota-surabaya-banyak-tak-tersentuh-pembangunan/>
- [25] Surya, L. (2017). "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu." *Rokan Hulu: Universitas Pasir Pengairan*.
- [26] Verasvera, F. (2016). "Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat)." *Jurnal Manajemen Maranatha*.
- [27] Wahdatul, L., Rahayu, S., & Dillak, V. J. (2016). "Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung." *E-Proceeding of Management*.
- [28] Wardani, N. D., & Silvia, D. (2021). "Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung." *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsuraya*, 6(1). 6(1), 47–56.